

RILIS 23 APRIL 2018

“PAPARAN HASIL TEMUAN BPK RI ATAS KERUGIAN NEGARA”

Oleh : Forum Indonesia untuk Transpanasi Anggaran

A. HASIL PEMERIKSAAN 2005-2017 (RPJMN)

Berdasarkan IHPS II tahun 2017, Badan Pemeriksaan keuangan RI (BPK RI), hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 303,4 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Status Pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai
Telah sesuai dengan rekomendasi	348.819 rekomendasi (73,2%)	Rp 151,4 triliun.
Belum sesuai dengan rekomendasi	94.725 rekomendasi (19,9%)	Rp 109,9 triliun.
Rekomendasi belum ditindaklanjuti	29.010 rekomendasi (6,1%)	Rp 29,3 triliun.
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	4.060 rekomendasi (0,8%)	Rp 12,8 triliun.
TOTAL	476.614 rekomendasi (100%)	Rp 303,4 triliun

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2017 ***telah ditindaklanjuti entitas*** dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp 79,3 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan periode 2005-2009 adalah sebesar Rp 29,4 triliun.
- Hasil pemeriksaan periode 2010-2014 adalah sebesar Rp 41,2 triliun.
- Hasil pemeriksaan periode 2015-2017 adalah Rp 8,7 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK dalam periode 2010-2014, terdapat 5 entitas dengan status rekomendasi belum ditindaklanjuti di atas 70%., sebagai berikut:

1. Pemkab Mamberamo Raya,
2. Proyek Hibah Dukungan Gempa Bumi dan Tsunami / Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP),
3. PT Industri Gelas (Persero),
4. PT Pertani (Persero), dan
5. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Hal ini menunjukkan belum adanya komitmen dari pimpinan entitas terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Jika entitas terkait tidak bisa menindak lanjut, maka akan terjadi kerugian negara atas kelalaian pimpinan entitas terkait.

B. HASIL PEMERIKSAAN 2015-2017 (PEMERINTAHAN JOKOWI)

1. PEMERINTAH PUSAT

Pada pemerintahan Pusat, BPK memberikan 16.764 rekomendasi senilai Rp 34,2 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 K/L, dengan rincian:

Status Pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai
Telah sesuai dengan rekomendasi	7.674 rekomendasi (45,8%)	Rp 7,8 triliun
Belum sesuai dengan rekomendasi	6.334 rekomendasi (37,8%)	Rp 23,6 triliun

Rekomendasi belum ditindaklanjuti	2.713 rekomendasi (16,2%)	Rp 2,6 triliun
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	43 rekomendasi (0,2%)	Rp 0,39 triliun
TOTAL	16.764 rekomendasi (100%)	Rp 34,2 triliun

2. PEMERINTAH DAERAH

Pada pemerintahan Daerah, BPK memberikan 92.889 rekomendasi senilai Rp 28, triliun kepada 542 pemerintah daerah. Terhadap rekomendasi tersebut, jumlah yang baru ditindak lanjuti hanya sebesar Rp 3,8 triliun.

Status Pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai
Telah sesuai dengan rekomendasi	52.622 rekomendasi (56,6%)	Rp 5,5 triliun
Belum sesuai dengan rekomendasi	29.898 rekomendasi (32,2%)	Rp 8,9 triliun
Rekomendasi belum ditindaklanjuti	10.212 rekomendasi (11,0%)	Rp 13,2 triliun
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	157 rekomendasi (0,2%)	Rp 0,215 triliun
TOTAL	92.889 rekomendasi (100%)	Rp 28, triliun

3. BUMN

Pada pemerintahan BUMN, BPK memberikan 4.877 rekomendasi senilai Rp 39,3 triliun, Terhadap rekomendasi tersebut, Terhadap rekomendasi tersebut, jumlah yang baru di tindak lanjuti hanya sebesar Rp 2,4 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Status Pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai
Telah sesuai dengan rekomendasi	2.245 rekomendasi (46,0%)	Rp 5,4 triliun
Belum sesuai dengan rekomendasi	839 rekomendasi (17,2%)	Rp 27 triliun
Rekomendasi belum ditindaklanjuti	1.776 rekomendasi (36,4%)	Rp 6,7 triliun
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	17 rekomendasi (0,4%)	Rp 0,2 miliar
TOTAL	4.877 rekomendasi (100%)	Rp 39,3 triliun

C. KERUGIAN NEGARA

Pada IHPS II Tahun 2017, BPK memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-2017 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp 2,6 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

1. PEMERINTAH PUSAT (RP 554,7 MILIAR)

Pada **Pemerintahan Pusat** terdapat kerugian negara senilai Rp 719,6 miliar dan sudah diselesaikan sebesar Rp. 164,7 miliar, dengan penyelesainan sebagai berikut:

Penyelesaian	%	Jumlah
Angsuran	(3%)	Rp 24,6 miliar
Pelunasan	(13%)	Rp 91,6 miliar
Penghapusan	(7%)	Rp 48,5 miliar
TOTAL		Rp. 164,7 miliar

2. PEMERINTAH DAERAH (RP 984,7 MILIAR)

Pada **Pemerintahan Daerah** terdapat kerugian negara senilai Rp 1,81 triliun dan sudah diselesaikan sebesar Rp. 826,1 miliar, dengan penyelesaian sebagai berikut:

Penyelesaian	%	Jumlah
Angsuran	(9%)	Rp 165,1 miliar
Pelunasan	(36%)	Rp 653,76 miliar
Penghapusan	(1%)	Rp 7,3 miliar
TOTAL		Rp. 826,1 miliar

3. BUMN (RP 77,9 MILIAR)

Pada **BUMN** terdapat kerugian negara senilai Rp 122,5 miliar dan sudah diselesaikan sebesar Rp. 44,5 miliar, dengan penyelesaian sebagai berikut:

Penyelesaian	%	Jumlah
Angsuran	(2%)	Rp 3,1 miliar
Pelunasan	(22%)	Rp 27,2 miliar
Penghapusan	(12%)	Rp 14,2 miliar
TOTAL		Rp. 44,5 miliar

4. BUMD (RP 12,5 MILIAR)

Pada **BUMD** terdapat kerugian negara senilai Rp 15,1 miliar dan sudah diselesaikan sebesar Rp. 44,5 miliar, dengan penyelesaian sebagai berikut:

Penyelesaian	%	Jumlah
Angsuran	(4%)	Rp 0,685 miliar
Pelunasan	(13%)	Rp1,94 miliar
Penghapusan	(0%)	Rp 0
TOTAL		Rp. 2,6 miliar

D. REKOMENDASI

Atas Temuan di atas ***FITRA*** merekomendasikan:

1. Menindak tegas pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004.
2. Pejabat terkait yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/ atau sanksi pidana.
3. Meningkatnya indeks keterbukaan Indonesia untuk di jadikan momentum nasional untuk perbaikan tatakelola, terutama di pemerintah daerah.

CP:

Yenny Sucipto (0812-2224-0008) Sekjen FITRA

Gurnadi R. (0856-7174713) Peneliti FITRA